

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

United Nation Population Fund (UNFPA) telah bekerjasama dengan India untuk menghentikan *sex-selective abortion* sejak tahun 2001, hal ini dipicu karena *sex ratio at birth* India yang berada pada angka 891:1000. Setelah pemerintah India bekerja sama dengan UNFPA, *sex ratio* mengalami peningkatan 17 poin sehingga pada sensus 2011 berada pada angka 908:1000. Namun hal ini juga tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2017 *sex ratio at birth* kembali mengalami penurunan hingga 894:1000, dan angka ini sangat jauh dari *sex ratio normal* yaitu 952:1000.

Maka, sejak tahun 2001 UNFPA dan pemerintah India sudah melakukan berbagai macam implementasi program dan kebijakan yang tertuang dalam setiap Country Programme (CP), namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Country Programme UNFPA India akan diperbarui setiap satu kali lima tahun, dan akan dievaluasi setiap tahun kelima untuk dapat diperbaiki pada lima tahun berikutnya, setiap Country Programme tertuang dalam Country Programme Document, dan merupakan hasil dari kesepakatan antara UNFPA dan pemerintah India. Country Programme 8 untuk tahun 2013-2017 peneliti jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dikarenakan CP 8 telah selesai dilaksanakan dan saat ini CP 9 untuk tahun 2018-2022 masih berlangsung sehingga tidak dapat dianalisis.

Dalam hal mengatasi *sex-selective abortion*, UNFPA berperan sebagai donatur, mitra, dan badan pengawas untuk setiap program dan kebijakan yang diimplementasikan agar nantinya target untuk meningkatkan *sex ratio at birth* hingga 936:1000 pada akhir *Country Programme* 8 dapat tercapai.

Dalam penerapannya UNFPA mengalami beberapa tantangan sehingga sulit untuk mencapai target yang telah ditentukan. Tantangan-tantangan ini berasal dari pemerintah India itu sendiri, di mana pemerintah India tidak melaksanakan Country Programme yang telah disepakati. Padahal pada kenyataannya, Country Programme UNFPA India dibentuk untuk pemenuhan kebutuhan India, dengan harapan dapat mengatasi *sex-selective abortion*.

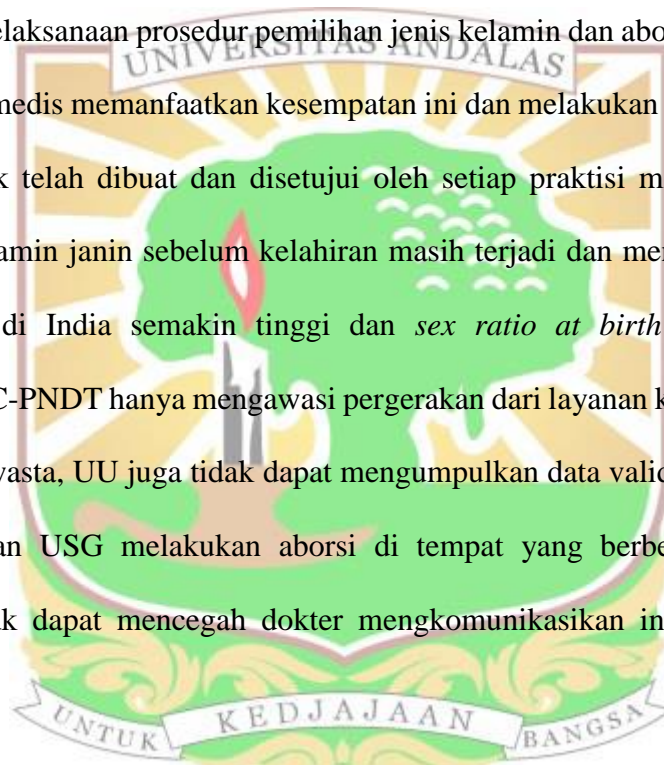
Salah satu program utama dari *Country Programme* 8 adalah *Beti Bachao Beti Padhao*, yaitu program yang dibentuk pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan rasio dan berfokus pada pendidikan anak perempuan. Namun, program ini tidak dapat mencapai tujuan-tujuannya dikarenakan adanya pengimplementasian program yang gagal, pengalokasian dana BBBP yang tidak tepat, kesenjangan dalam implementasi program BBBP di setiap daerah, banyak agenda pertemuan yang tidak terlaksana, dan pemalsuan data yang dilakukan oleh pemerintah. Tantangan dalam implemtnasi program BBBP ini diakibatkan oleh pemerintah itu sendiri.

Selanjutnya, program hasil kerjasama UNFPA, dan pemerintah India lainnya adalah *Girls Count Coalition*. *Girls Count Coalition* adalah koalisi nasional lebih dari 400 organisasi sipil di seluruh India, dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat pada isu-isu diskriminasi berbasis gender, dengan fokus khusus pada penurunan rasio anak. Koalisi ini juga bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, memperkuat advokasi, dan pengembangan kapasitas masyarakat. *Girls Count Coalition* berfokus pada tiga daerah paling krisis gender yaitu Maharashtra, Delhi, dan Haryana.

Penerapan *Girls Count Coalition* di Maharashtra tidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan adanya campur tangan politik yang tidak sehat dalam implementasi PC-PNDT, dan data kasus yang dilaporkan bukanlah data sebenarnya. *State Inspection and Monitoring Committee (SIMC)* juga tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Berbeda dengan

Maharashta, penerapan Girls Count Coalition tidak mendapat respon yang baik oleh pemerintah setempat, dikarenakan *sex-selective abortion* menurut mereka bukanlah hal yang penting dan sering dianggap remeh. Di Haryana, agenda rapat yang ditetapkan selalu gagal dilaksanakan dan mengakibatkan gagalnya rencana strategi yang telah dirancang untuk setiap daerah.

Tidak hanya Girls Count Coalition, pemerintah juga memberikan tantangan implementasi kepada UNFPA dalam hal tenaga medis. Tidak kuatnya badan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan prosedur pemilihan jenis kelamin dan aborsi membuat beberapa oknum dari tenaga medis memanfaatkan kesempatan ini dan melakukan tindakan pelanggaran. Meskipun kode etik telah dibuat dan disetujui oleh setiap praktisi medis, namun tindakan penentuan jenis kelamin janin sebelum kelahiran masih terjadi dan menyebabkan angka *sex-selective abortion* di India semakin tinggi dan *sex ratio at birth* semakin mengalami ketimpangan UU PC-PNDT hanya mengawasi pergerakan dari layanan kesehatan milik negara dan tidak dengan swasta, UU juga tidak dapat mengumpulkan data valid karena orangtua atau ibu yang melakukan USG melakukan aborsi di tempat yang berbeda. Hukuman yang ditetapkan UU tidak dapat mencegah dokter mengkomunikasikan informasi tentang jenis kelamin janin.



Banyaknya tantangan yang ditimbulkan oleh pemerintah India menjadikan usaha dan upaya yang dilakukan oleh UNFPA, civil society, dan mitra koalisi lain seolah jalan di tempat. Masalah yang ditimbulkan dari ketidaksiapan pemerintah untuk membuat perubahan menjadi tantangan tersendiri bagi UNFPA, dan target untuk mencapai *sex ratio at birth* di India pada tahun 2017 tidak tercapai.

5.2 Saran

Setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian terkait tantangan UNFPA di India dalam mengatasi *sex-selective abortion*, peneliti dapat menyarankan beberapa saran untuk memudahkan peneliti selanjutnya yang akan meneliti *sex-selective abortion* di India. Pertama, penguasaan bahasa sangat diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data, karena terdapat beberapa data yang justru disajikan dalam bahasa Hindi, terutama ketika menganalisis respon masyarakat terkait *sex-selective abortion* dan penerimaan masyarakat terhadap perempuan. Kedua, tingkatkan kesadaran terkait isu-isu *gender* di India yang berbeda-beda di setiap daerahnya, dan penerapan kebijakan yang juga berbeda di setiap daerahnya.

